

Kehidupan Sosial dan Politik Regentschap Sidokarie Pasca Pemekaran Regentschap Soerabaija Tahun 1859-1862

Sindi FitriaNingsih

Jurusan Pendidikan Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan

Hukum Universitas Negeri

Surabaya

Email: sindi.18104@mhs.unesa.ac.id

Artono

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Email: artono@unesa.ac.id

Abstrak

Kajian tentang kondisi sosial politik di suatu wilayah selama ini terfokus kepada pergantian pemimpinnya saja. Data primer pada masa itu diambil dari arsip pemerintah sebagai bukti nyata untuk peristiwa yang pernah dirasakan oleh kaum masyarakat tengah. Surabaya adalah ibu Kota Karesidenan Surabaya di masa Hindia Belanda yang membawahi enam wilayah yaitu Gresik, Mojokerto, Lamongan, Jombang, dan Sidoarjo. Namun Kadipaten Surabaya kemudian terpecah menjadi dua, pada tahun 1859 berdasarkan *Staatsblad* No.6 yang dikeluarkan pada 31 Januari 1859, hal tersebut mengakibatkan perubahan kondisi sosial dan politik di Sidoarjo. Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan antara lain (i) Pemilihan topik, (ii) Pengumpulan sumber, (iii) Verifikasi atau kritik, (iv) Interpretasi atau penafsiran, dan (v) Historiografi yang bersumber pada *Nieuw Soerabaia*, *Oud Soerabaia*, dan Jejak Sidoarjo dari Jenggala ke Suriname, disusunlah penelitian ini bermaksud mendapatkan data sejarah pemekaran wilayah Kadipaten Surabaya pada tahun 1859-1862 dan kondisi sosial dan politik pada saat pemekaran kota tersebut. Pada penelitian ini kondisi pemekaran wilayah tersebut mengakibatkan timbul permasalahan baru seperti *cultuurstelsel* di Pabrik Gula Watoetoelis merupakan salah satu eksportir gula prioritas atau utama pada masa pemerintahan Hindia Belanda, adanya penggolongan status sosial seperti pemilik lahan luas yang menjadi seorang haji, pemberontakan antara petani dan pemerintah kolonial Belanda, serta Masjid Jami Al Abror yang menjadi pusat perkembangan Islam di Sidoarjo.

Kata Kunci: *Sidoarjo, Sosial, Politik*

Abstract

So far, studies on socio-political conditions in an area have focused on changing leaders only. Primary data at that time was taken from government archives as tangible evidence for events experienced by the middle class. Surabaya was the capital of the residency of Surabaya during the Dutch East Indies era which was in charge of six regions, namely Gresik, Mojokerto, Lamongan, Jombang, and Sidoarjo. However, the Duchy of Surabaya was then split into two, in 1859 based on *Staatsblad* No. 6 issued on January 31, 1859, this resulted in changes in social and political conditions in Sidoarjo. The research methods used include (i) topic selection, (ii) source collection, (iii) verification or criticism, (iv) interpretation or interpretation, and (v) historiography sourced from *Nieuw Soerabaia*, *Oud Soerabaia*, and Jejak Sidoarjo from Jenggala to Suriname, this research was compiled with the intention of obtaining historical data on the history of the expansion of the Duchy of Surabaya in 1859-1862 and the social and political conditions at the time of the division of the city. In this study, the condition of the expansion of the region resulted in new problems such as the *cultuurstelsel* at the Watoetoelis Sugar Factory which was one of the priority or main sugar exporters during the Dutch East Indies government, the classification of social status such as the owner of a large land who became a hajj, rebellion between farmers and the colonial government. The Netherlands, as well as the Jami Al Abror Mosque which became the center of the development of Islam in Sidoarjo.

Keywords: *Sidoarjo, Social, Politics*

PENDAHULUAN

Wilayah Surabaya yang meliputi ujung timur Jawa dan kota Surabaya menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan wilayah tersebut pada saat di masa Belanda. Sebelum terjadinya aneksasi oleh Belanda, Surabaya termasuk dalam wilayah Mataram (1625-173). Secara etnografis, Surabaya bahkan lebih dekat dengan Jawa murni, sedangkan unsur Madura mulai lebih banyak muncul di Timur. Wilayah administrasi kediaman Surabaya terjadi perubahan di tahun 1817 yaitu wilayah Madura Barat dibebaskan menjadi tempat tinggal yang dikenal sebagai kediaman Madura dan Sumenep. Terjadinya perubahan tempat tinggal di kota Surabaya terjadi pada tahun 1826, Gresik pada waktu itu berdiri sendiri sebagai kawasan perumahan diubah pada tahun 1826. Madura dan Sumenep di tahun 1827 sampai di tahun 1856 bergabung kembali dalam Afdeeling Surabaya. Bawean yang semula menjadi bagian dari Karesidenan Gresik, masuk ke dalam bagian Surabaya, ketika Gresik dilebur menjadi satu Karesidenan dengan Surabaya sampai tahun 1870. Wilayah Kota Sidoarjo sejatinya sudah mulai eksis sejak masa Hindu Budha yang saat itu termasuk ke dalam wilayah Delta Brantas, hal ini ditandai dengan ditemukannya Prasasti Kamalagyan yang berada di Krian. Prasasti ini dikeluarkan oleh Airlangga atas keberhasilannya membangun bendungan di daerah Wringin Saptu.

Ibu kota Karesidenan Surabaya di kukuhkan pada zaman Hindia Belanda, memiliki wilayah yang kini adalah wilayah Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, dan Lamongan. Sungai Porong dan Sungai Surabaya menghimpit Kabupaten Sidoarjo, yang dikenal menjadi kota Delta. Luas area darat adalah 714,245 km² dan luas area laut adalah 201,6868 km² kondisi ini menurut perhitungan GIS sampai 4 mil ke arah laut.

Pada masa penjajahan Kolonial, Sidoarjo juga berperan sangat penting bagi Belanda. Pabrik gula mulai dimiliki pemerintah Belanda berada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana tidak, wilayah Sidoarjo yang merupakan sebuah Delta, sangat cocok sekali sebagai tempat perkebunan tebu. Hampir disetiap kecamatan yang ada di Sidoarjo terdapat Pabrik Gula (PG). Pabrik-Pabrik gula di Sidoarjo tersebut yakni PG. Krian, PG, Toelangan, PG. Krembong, dan juga PG. Watoetoelis.² Hal ini menjadikan Sidoarjo sebagai basis ekonomi pertanian dan kekuatan ekonomi sangat kuat dengan adanya pabrik-pabrik gula tersebut.³

Sidoarjo juga merupakan kota pemberhentian, perkembangan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo juga bisa dibilang tidak kalah dengan Surabaya. Pembangunan infrastruktur meliputi Masjid Al Abror Sidoarjo, Masjid Jamik atau masjid yang di sebut Masjid Agung Sidorajo dan Pesarean Pendem (Asri).⁴

Pada waktu itu Surabaya berada pada kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadinigrat. Setelah adanya perjanjian Giyanti, dua kerajaan besar telah menguasai area pulau Jawa atau disebut *Vorstenlanden*. Kerajaan tersebut adalah Kasultanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Diakui

atau tidak, Sidoarjo merupakan sebuah kota yang dibuat oleh pemerintah Belanda.

Pada pertengahan abad ke-19, Surabaya menjadi kerajaan teritorial yang besar. Pada waktu itu kepangeranan terdiri dari Bojonegoro, Sidoarjo, dan Sedayu (dimana saat itu disebut kawedanan Sidokarie). Dengan batas wilayah berdasarkan Surat Keputusan Staatsblad Pemerintah Belanda pada tanggal 28 Mei 1859 No. 10/1859, maka batas wilayah Sidoarjo adalah barat (Kab. Gresik), timur (Selat Madura), selatan (Kab. Pasuruan). utara (Surabaya). Terdapat 6 kawedanan di bidang pemerintahan yaitu: Kawedanan Sidoarjo, Kawedanan Gedangan, Kawedanan Bulang, Kawedanan Taman Jenggolo, Kawedanan Krian, Kawedanan Porong Jenggolo.

Pemekaran Kadipaten Surabaya di pimpin pemerintah kolonial tertuang pada *Staatsblad* No.6 yang dikeluarkan pada 31 Januari 1859 menyebutkan Kadipaten Surabaya kemudian terbagi dua⁵, yaitu Kabupaten Sidokarie dan Kabupaten Surabaya, dan untuk area wilayah terbagi berupa distrik Djenggolo I di daerah Waroe, Djenggolo II berada di daerah Sidhoardjo, Djenggolo III berada di daerah Krian, dan Djenggolo IV berada di daerah Pasar Besar, serta Rawapoeloe I berada di daerah Porong dan Rawapoeloe II berada di daerah Boelang.⁶ Dengan surat keputusan yang dikeluarkan di tahun 1859 berpisah dari Surabaya. Sehingga pada tahun tersebut *Residen* diangkat menjadi pemimpin Kabupaten Sidokarie adalah R. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan, putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di kampung Pandean.

Masjid di Pekauman mulai dilakukan pembangunan yang menjadi penandaan masa pemerintahan yang mengalami perbaikan mengikuti perkembangan zaman pada saat itu⁷. Pada tahun yang sama nama Sidokarie diubah menjadi Sidoarjo berdasarkan SK ini yang tertuang dalam Lemaran Negara Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1859 Nomor 10 Staatsblad Nomor. 32⁸. Dengan adanya pemukiman ini maka Sidoarjo resmi menjadi salah satu kabupaten di Surabaya.

Perubahan ini masih kontroversial di kalangan sejarawan. Banyak pihak yang percaya bahwa perubahan ini ada hubungannya dengan implikasi yang tidak berarti dari Sidokarie sehingga hanya menjadi alasan bagi pemerintah Belanda untuk memfasilitasi pengawasan para pemberontak.

Dari sekian banyak artikel yang membahas pemekaran Sidoarjo dari Surabaya, tidak ada satupun yang membahas faktor kehidupan sosial politik yang menyebabkan perpecahan ini. Selain itu, reaksi masyarakat terhadap pemekaran Kabupaten Sidoarjo masih belum tergali. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menemukan alasan lain mengapa perpecahan ini terjadi.

METODE PENELITIAN

Pada tahap metode penelitian ini menganalisis akan Kehidupan Sosial dan Politik Regentschap Sidokarie Pasca Pemekaran Regentschap Soerabaija Tahun 1859-1862.

¹ Lihat *Kabupaten Sidoarjo - Pemkab Sidoarjoportal.sidoarjo.kab.go.id*

² Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006), hlm. 51.

³ Ibid. hlm. 32.

⁴ Ibid. hlm. 40.

⁵ Ibid. hlm. 38.

⁶ Staatsblad van Nederlandsch Indie, Splitsing van het Regentschap Soerabaija in Twee Regentschappen, 1859, no. 6a, hlm. 1.

⁷ Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, op.cit., hlm. 39.

⁸ Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, op.cit., hlm. 39.

Penelitian ini akan meliputi (i) pemilihan topik, dimana topik penelitian ini dipilih dikarenakan masih adanya alasan yang belum terkuak atau minimnya informasi yang terkait dengan pemekaran itu terjadi. (ii) pengumpulan sumber, Pada tahap penelusuran sumber, penulis mengumpulkan sumber yang terkait dengan Sosial dan Politik Regentschap Sidokarie Pasca Pemekaran Regentschap Soerabaija Tahun 1859-1862 Informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian diperoleh dari sumber yang digunakan yaitu arsip dokumen buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik. penulisan ini. (iii) verifikasi atau kritik, Kritik sumber, untuk mendapatkan validitas sumber maka verifikasi dilakukan penulis. (iv) interpretasi atau interpretasi Setelah kritik terhadap sumber diperoleh barulah dilakukan interpretasi atau interpretasi terhadap sumber-sumber tersebut. (v) Historiografi⁹, Pada fase terakhir setelah rekonstruksi sejarah dalam interpretasi laporan akhir ditulis setelah penelitian sejarah tentang “Kehidupan Sosial dan Politik Regentschap Sidokarie Pasca Pemekaran Regentschap Soerabaija Tahun 1859-1862”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karesidenan Surabaya Secara Umum

Terletak di Jawa, Surabaya telah lama menjadi kawasan komersial yang berkembang pesat. Kota di pulau Jawa sebelum datangnya kolonialisme dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kota komersial di wilayah pesisir dan kota kerajaan di pedalaman agraris. Surabaya termasuk kota pesisir karena Surabaya terletak di wilayah utara pulau Jawa selain itu Surabaya juga memiliki basis ekonomi perdagangan dan pelayaran.

Faber dalam Handinoto menjelaskan bahwa Kota Surabaya didirikan pada 1275 oleh Kertanegara sebagai koloni baru bagi prajuritnya yang berhasil mengalahkan pemberontakan Kanuruhan. Sejak mengusir tentara Tartar dari muara Sungai Kalimas pada tahun 1293 M.¹⁰



Foto: Kaart van de Residentie Soerabaya (Sumber, Uitgegeven door van Haren Noman en Kolff te Batavia.

Pada masa penjajahan terutama sebelum tahun 1900 penyebutan Surabaya dipergunakan menjadi beberapa kategori administratif antara lain keresidenan distrik dan distrik. Tempat di Surabaya di ujung timur Jawa, menghadap Laut Jawa dan Selat Madura. Setelah barat berbatasan dengan Kediri dan Remang Residence dan di selatan berbatasan dengan Pasuruan Residence yang ditandai dengan Sungai Porong. Surabaya Mansion dikelola oleh

enam instansi yaitu Surabaya Sidoarjo Mojokerto Jombang Gresik dan Lamongan.¹¹

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Surabaya berkembang sebagai kota pelabuhan yang penting dan strategis. Keberadaan pelabuhan Kalimas mengarahkan keluar masuknya barang dan orang dari dan ke Surabaya. Surabaya adalah penghubung antara pantai dan pedalaman. Berkat lokasinya yang strategis Surabaya menjadi pusat pemerintahan dekat dengan produsen perkebunan. Traffic komersial ini terlihat dari banyaknya kantor komersial dan bank yang telah memuka cabang di Surabaya untuk mendukung kegiatan bisnis komersial.¹²

Pada akhir aad ke-19 Surabaya telah menjadi kota besar di Hindia Belanda. Surabaya pernah menjadi kota terbesar dan terpenting di Hindia Belanda bahkan dibandingkan dengan Batavia. Surabaya adalah pelabuhan penting di Asia modern sejajar dengan Kalkuta Rangoon Singapura Bangkok Hong Kong dan Shanghai.¹³

B. Latar Belakang Penggabungan Kabupaten Sidokarie Ke Kabupaten Surabaya

Daerah Surabaya pada masa Belanda termasuk di ujung timur pulau Jawa dan kota Surabaya menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan daerah tersebut. Sebelum dianeksasi oleh Kompeni Surabaya termasuk dalam wilayah Mataram (1625-1743). Secara etnografis Surabaya bahkan lebih dekat dengan Jawa murni sedangkan unsur Madura mulai lebih banyak muncul di Timur. Pada tahun 1817 wilayah administrasi Keresidenan Surabaya mengalami perubahan yaitu wilayah Madura Barat yang dibebaskan menjadi keresidenan dengan nama Karesidenan Madura dan Sumenep. Pada tahun 1826 wilayah tempat tinggal Surabaya mengalami perubahan lagi Gresik yang sebelumnya mandiri sebagai tempat tinggal pada tahun 1826. Tahun 1827 Madura dan Sumenep bergabung dengan Afdeeling Surabaya sampai tahun 1856. Bawean yang semula menjadi bagian dari Karesidenan Gresik, masuk ke dalam bagian Surabaya, ketika Gresik dilebur menjadi satu Karesidenan dengan Surabaya sampai tahun 1870.

Kerajaan Jenggala merupakan sebutan kota sidoarjo pada zaman dahulu yang dapat ditelusuri dari adanya keberadaan prasasti Turun Hyang II dan bangunan Candi Pari. Dalam kolonialisme India Timur Belanda wilayah Sidoarjo bernama Sideokarie adalah bagian dari Kabupaten Surabaya. Bertempat tinggal di Desa Pucang Anom R. Ng. Djojohardjo, didukung dari Wedana Bagus Ranuwiryo tinggal di desa Pangaahan. Pada 1859 berdasarkan Keputusan Belanda di India Timur. 91859 Pada tanggal 31 Januari 1859 Staatslad # 6 wilayah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokarie. Sidokarie LED R. Notopuro (kemudian dikenal sebagai R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Dia adalah putra R.A.P. Tjokronegoro Bupati Surabaya.

Pada tanggal 28 Mei 1859 nama buruk Kabupaten Sidokarie diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. Sepeninggal

⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

¹⁰ Handinoto. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1996) hlm. 31

¹¹ Basundoro, P. *Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960 an*. (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2013) hlm. 29

¹² Faber, G.H. von, *Oud Soerabaia. De Geschiedenis van Indies Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906)*. (Soerabaia: N.V. Kon. Boekhandelen Drukkerijen G. Kolff & Co., 1931) hlm. 150-152

¹³ Dick, H.W. *Surabaya, City of Work, A Socioeconomic History, 1900-2000*. (athens: Ohio University Press, 2006) hlm. 27-28

R. Notopuro pada tahun 1862 mendiang saudaranya pada tahun 1863 diangkat menjadi Bupati yaitu Raja Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro II adalah pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro pensiun malah diangkat menjadi R.P. Sumodosystemjo meninggalkan Tulungagung tetapi menjaat hanya 3 bulan sebagai Bupati ketika ia meninggal pada tahun yang sama dan R.A.A.T. Tjondronegoro I telah ditunjuk untuk menggantikannya. Pada masa pendudukan Jepang (8 Maret 1942 - 15 Agustus 1945) Belanda mulai aktif dalam upaya merebut kemali wilayah tersebut.

Ketika Belanda menduduki Gedangan pemerintah Indonesia memindahkan kantor pusatnya dari Sidoarjo ke Porong. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda pada hari yang sama. Pusat pemerintahan Sidoarjo kemudian dipindahkan ke wilayah Jombang. Pemerintah pendudukan Belanda (dikenal sebagai Recoma) berusaha mengembalikan pemerintah ke negara jajahannya. Pada bulan Novemer 1948 negara bagian Jawa Timur didirikan sebagai salah satu negara bagian Republik Indonesia. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recoma sampai tahun 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 atas persetujuan Meja Bundar Belanda mengembalikan negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia Serikat sehingga daerah dataran Brantas tertular dengan sendirinya menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Wilayah Kota Sidoarjo sejatinya sudah mulai eksis sejak masa Hindu Budha yang saat itu termasuk ke dalam wilayah Delta Brantas, hal ini ditandai dengan ditemukannya Prasasti Kamalagyan yang berada di Krian. Prasasti ini dikeluarkan oleh Airlangga atas keberhasilannya membangun bendungan di daerah Wringin Saptu. Pada masa Hindia Belanda Surabaya dijadikan sebagai ibu kota penduduk Surabaya wilayahnya juga termasuk yang sekarang menjadi kerajaan Gresik Sidoarjo Mojokerto Lamongan dan Jombang. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu ibu kota provinsi yang diapit oleh dua sungai yaitu Kali Porong dan Kali Surabaya sehingga terkenal sebagai kota dataran. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas daratan 714.245 km² dan luas lautan berdasarkan perhitungan GIS 4 mil dari laut adalah 201.6868 km². Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam provinsi Jawa Timur.

Di masa penjajahan Kolonial, Sidoarjo juga berperan sangat penting bagi pemerintah Belanda. Banyak pabrik gula yang milik pemerintah Belanda yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana tidak, wilayah Sidoarjo yang merupakan sebuah Delta, sangat cocok sekali sebagai tempat perkebunan tebu. Hampir disetiap kecamatan yang ada di Sidoarjo terdapat Pabrik Gula. Pabrik gula di Sidoarjo tersebut yakni PG. Kremboong PG. Krian, PG. Watoetoelis, PG. Toelangan.¹⁴ Hal ini menjadikan Sidoarjo sebagai basis ekonomi pertanian dan kekuatan ekonomi sangat kuat dengan adanya pabrik-pabrik gula tersebut.¹⁵

Tak hanya itu, Sidoarjo merupakan kota *transit*, perkembangan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo juga bisa dibilang tidak kalah dengan Surabaya. Pembangunan

infrastruktur meliputi Masjid Al Abror Sidoarjo, Masjid Jamik (Masjid Agung Sidorajo) dan Pesarean Pendem (Asri).¹⁶

Pada waktu itu Surabaya berada pada kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadinigrat. Setelah adanya perjanjian Giyanti, dua kerajaan besar telah menguasai area pulau Jawa atau disebut *Vorstenlanden*. Kerajaan tersebut adalah Kasultanan Surakarta dan Kasunanan Yogyakarta. Diakui atau tidak, Sidoarjo merupakan sebuah kota yang dibuat oleh pemerintah Belanda.

Pada pertengahan abad ke-19, Surabaya menjadi kerajaan teritorial yang besar. Pada waktu itu kepangeranan terdiri dari Bojonegoro, Sidoarjo, dan Sedayu (dimana saat itu disebut kawedanan Sidokarie). Dengan batas wilayah berdasarkan Surat Keputusan Staatsblad Pemerintah Belanda pada tanggal 28 Mei 1859 No. 10/1859, maka batas wilayah Sidoarjo adalah barat (Kab. Gresik), timur (Selat Madura), selatan (Kab. Pasuruan), utara (Surabaya). Terdapat 6 kawedanan di bidang pemerintahan yaitu: Kawedanan Sidoarjo, Kawedanan Gedangan, Kawedanan Bulang, Kawedanan Taman Jenggolo, Kawedanan Krian, , Kawedanan Porong Jenggolo.¹⁷

Pemekaran Kadipaten Surabaya di pimpin pemerintah kolonial tertuang pada *Staatsblad* No.6 yang dikeluarkan pada 31 Januari 1859 menyebutkan Kadipaten Surabaya kemudian terbagi dua¹⁸, yaitu Kabupaten Sidokarie dan Kabupaten Surabaya, dan untuk area wilayah terbagi berupa distrik Djenggolo I di daerah Waroe, Djenggolo II berada di daerah Sidhoarjo, Djenggolo III berada di daerah Krian, dan Djenggolo IV berada di daerah Pasar Besar, serta Rawapoeloe I berada di daerah Porong dan Rawapoeloe II berada di daerah Boelang.¹⁹ Dengan surat keputusan yang dikeluarkan di tahun 1859 tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya. Sehingga mulai pada tahun tersebut seorang *Residen* diangkat menjadi pemimpin Kabupaten Sidokarie adalah R. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan, putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di kampung Pandean.

Masjid di Pekauman atau Pandean mulai dilakukan pembangunan yang menjadi penandaan masa pemerintahan yang mengalami perbaikan mengikuti perkembangan zaman pada saat itu²⁰. Pada tahun yang sama nama Sidokarie diubah menjadi Sidoarjo berdasarkan SK ini yang tertuang dalam Lemaran Negara Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1859 Nomor 10 Staatsblad Nomor. 32²¹. Dengan adanya pemukiman ini maka Sidoarjo resmi menjadi salah satu kabupaten di Surabaya.

Perubahan ini masih kontroversial di kalangan sejarawan. Banyak pihak yang percaya bahwa perubahan ini ada hubungannya dengan implikasi yang tidak berarti dari Sidokarie sehingga hanya menjadi alasan bagi pemerintah Belanda untuk memfasilitasi pengawasan para pemberontak.

Dari catatan otentik Sidoarjo, wilayah ini benar-benar merupakan akibat dari pemekaran Kabupaten Surabaya. Sampai tahun 1851 daerah Sidoarjo masih

¹⁴ Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: dari Jengala ke Suriname*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006), hlm. 51.

¹⁵ Ibid. hlm. 32.

¹⁶ Ibid. hlm. 40.

¹⁷ Ibid. hlm. 40

¹⁸ Ibid. hlm. 38.

¹⁹ Staatsblad van Nederlandsch Indie, Splitsing van het Regentschap Soerabaja in Twee Regentschappen, 1859, no. 6a, hlm. 1.

²⁰ Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, op.cit.,hlm. 39.

²¹ Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, op.cit.,hlm. 39.

bernama Sidokarie, dipimpin oleh seorang wakil pimpinan, Raden Ngabehi Djojohardjo, memerintah di kota Pucang Anom, ia dibantu oleh seorang wenda bernama Bagus Ranuwiryo di kota Pangabahan. Pada tahun 1859 Belanda memisahkan Surabaya menjadi dua, Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokarie. Pejabat utama Sidoarjo adalah Raden Notopuro (RTP Tjokronegoro), anak Bupati Surabaya, RAP Tjokronegoro. Pemekaran ini terjadi sebelum berkembangnya banyak gemeente atau kotamadya di beberapa daerah di Jawa dan sebagian kecil di luar Jawa.

Pada masa provinsi Hindia Belanda, daerah Sidoarjo dikenal sebagai Sidokarie, yang penting bagi Kabupaten Surabaya. Pada tahun 1859, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. Enam wilayah Kabupaten Surabaya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokarie yang cerdik diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo.

Sepeninggal R. Notopuro pada tahun 1862 saudaranya pada akhir tahun 1863 diangkat menjadi Bupati yaitu Raja Bupati RTAA Tjokronegoro II yang dipindahkan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Raja Bupati Tjokronegoro menerima pensiun ukan diangkat R.P. Sumodedlyjo meninggalkan Tulungagung tetapi hanya setelah tiga bulan ia meninggal pada tahun yang sama dan R.A.A.T. Tjondronegoro I telah ditunjuk untuk menggantikannya. Pada masa pendudukan Jepang (8 Maret 1945 - Agustus 1945) wilayah Delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo juga berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang (khususnya Kaigun) Angkatan Laut Jepang).

Pada awal Maret 1946 Belanda mulai aktif dalam upaya mereka untuk menjadikan daerah ini. Ketika Belanda memegang Gieantan pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo di Porong. Kecamatan wilayah Sukodono telah menjadi area kontrol melawan Belanda. Pada tanggal 2 Desember 1946 Belanda mulai mengincar kota Sidoarjo dengan Pasukan Bala Serangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu. Pusat Pemerintahan Sidoarjo kemudian pindah ke daerah Jombang. Pemerintah Pekerjaan Belanda (disebut Recoma) mencoba untuk membentuk kembali pemerintah seperti pada zaman kolonial. Pada Novemer 1948 Java State didirikan salah satu negara bagian Republik Indonesia. Sidoarjo berdiri dalam kondisi daya tarik yang baik hingga 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagaimana disepakati konferensi meja bundar Belanda untuk Negara Bagian Jawa Timur untuk Republik Indonesia ke daerah Delta Brantas telah menjadi wilayah Republik Indonesia.

Jauh setelah dua masa tersebut, tanggal 31 Januari yang menjadi momen peristiwa perubahan nama Sidokarie menjadi Sidoarjo tetap dikenang. Kini tanggal tersebut menjadi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo sendiri meskipun wilayahnya kecil (berdasarkan luas berada di peringkat 29 dalam 38 kota kabupaten di Jawa Timur), tetapi sejarahnya juga besar.

1. Letak Geografis dan Demografi Sidoarjo

Kabupaten Surabaya dipisahkan menjadi dua bagian, tepatnya Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokarie melalui Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6. Nama Sidokarie kala itu tidak sama dengan Sidoarjo. Saat ini, 31

Januari merupakan peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu ibu kota asal Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang mengalami perbedaan waktu yang cepat. Pencapaian ini dicapai karena berbagai pintu terbuka di bidang-bidang seperti industri dan perdagangan, industri perjalanan, dan usaha kecil dan menengah dapat bergabung dengan baik dan tepat sasaran. Dengan hadirnya berbagai kemungkinan provinsi dan bantuan SDM yang memadai, dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi salah satu daerah yang signifikan untuk penyebarluasan kas daerah. Kabupaten Sidoarjo terletak pada kisaran 112°5' dan 112°9' Bujur Timur dan pada suatu tempat pada kisaran 7°3' dan 7°5' Selatan.

31 Januari, yang merupakan kedua kalinya nama Sidokarie berubah menjadi Sidoarjo, masih dikenang. Nah tanggal tersebut adalah Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo sendiri, meskipun wilayahnya sedikit (berdasarkan wilayah menempati urutan ke-29 dari 38 wilayah perkotaan di Jawa Timur). Sidoarjo merupakan kota yang dikenal sebagai citra udang dan bandeng. Sidoarjo memiliki luas sekitar 591,59 km. Sidoarjo dulu dikenal sebagai titik pusat wilayah Jenggolo pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, beberapa waktu yang lalu kota Sidoarjo dikenal dengan nama Sidokarie Sido = so karie = gulai untuk penjelasan perubahan penduduk sangat mengerikan, sehingga nama Sidokarie diubah menjadi Sidoarjo. Daerah Sidokarie dulunya dikemudikan oleh seorang kepala yang ditunjuk bernama R.Ng. Djooharjo yang tinggal di sebuah kota bernama Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana khususnya Bagus Ranuwiryo yang tinggal di kota Pangabahan pada tahun 1859. Di Hindia Belanda, pada tanggal 31 Januari 1859, wilayah Surabaya diisolasi menjadi 2 lokal.

Kabupaten Surabaya dan Sidokarie. Sidoarjo disebut juga sebagai kota delta karena terletak di antara 2 sungai besar yang berbeda dengan Sungai Brantas, yaitu Sungai Mas dan Sungai Porong. Sidoarjo terletak di selatan Surabaya, secara geografis kedua jaringan metropolitan ini tampak menjadi satu.

Secara geografis Kabupaten Sidoarjo terletak pada 112,5-112,9 derajat bujur timur dan 7,3-7,5 derajat batas selatan. Luas laut Kabupaten Sidoarjo yang ditunjukkan oleh alat pengukur SIG sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah 201,6868 Km. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terjauh adalah:

Tabel 1. Batas Area Kabupaten Sidoarjo

Utara	Kota Surabaya Dan Kabupaten Gresik
Timur	Selat Madura
Selatan	Kabupaten Pasuruan
Barat	Kabupaten Mojokerto

Demikian pula, Sidoarjo dibatasi oleh dua aliran air yang sangat besar, yaitu Kalimas di utara (melintasi kota Surabaya) dan Kali Porong di selatan (melintasi Kabupaten Pasuruan). Di sebelah timur, yang melapisi Selat Madura, terdapat kawasan budidaya danau yang sangat luas terbentang dari Surabaya hingga Pasuruan. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha. Sebagian besar wilayah Sidoarjo (40,81%) terletak pada ketinggian 3-10

meter yang berada di tengah dan memiliki air baru. 29,99% wilayah Kabupaten Sidoarjo bagian timur merupakan kawasan waterfront dan hidroponik dengan tinggi 0-3 meter dan selebihnya setinggi 10-25 meter. Dengan struktur tanah aluvial redup seluas 6.236,37 ha. Relasi Aluvial Abu-abu dan Coklat seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha dan Grumosol Dark Grey seluas 870,70 Ha. Topografi wilayah ini merupakan wilayah tengah Delta dengan ketinggian 0-25 m, naik 0-3 m dengan luas 19.006 ha, meliputi 29,99% yang merupakan wilayah aqua-farming yang terletak di bagian timur. Di bagian tengah kawasan air tawar dengan ketinggian 3-10 meter di atas permukaan laut terdapat kawasan permukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Untuk sementara, di wilayah barat kabupaten dengan ketinggian 10-25 meter di atas permukaan laut merupakan kawasan hijau sebesar 29,20%.

Luas spesifik persawahan kabupaten Sidoarjo sebesar 36,87%, pemukiman (kota, penginapan, lapangan olah raga, kuburan, pemerintahan) sebesar 22,70%, perairan pedalaman sebesar 21,88%, industri sebesar 2,66%, hutan (sejenis mangrove) sebesar 1,45%, lahan terbuka (lahan kosong) sebesar 1,23%, hortikultura lahan kering sebesar 0,37%, pertambangan sebesar 0,04 dan lain-lain (jalan dan sungai) sebesar 10,79%. Secara hidrogeologi, wilayah ini merupakan wilayah air tanah, air asin dan air asin mencapai area seluas 16.312,69 ha. Kedalaman air tanah biasa adalah 0-5m dari awal. Wilayah Sidoarjo terletak di rawa-rawa. Sidoarjo dikenal sebagai Kota Delta, karena terletak di antara dua banjir signifikan Sungai Brantas, tepatnya Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo terletak di selatan Surabaya dan secara geologis kedua jaringan metropolitan tersebut tampaknya menjadi satu.

Wilayah ini juga terletak di antara dua saluran air, tepatnya Kali Surabaya dan Kali Porong, yang merupakan sumber Sungai Brantas yang bermula di Kabupaten Malang. Seperti halnya daerah-daerah lain di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki panas dan lengket serta mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim semilir. Musim kemarau berlangsung dari Mei sampai September dan sisa bulan, Oktober sampai April, adalah musim badai. Suhu udara berkisar antara 20-35 derajat Celcius. Kabupaten Sidoarjo secara definitif terdiri dari 18 sub-lokal yang terpisah menjadi 322 wilayah perkotaan dan 31 komunitas perkotaan metropolitan. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pilar ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang berkembang pesat. Pencapaian ini tidak lepas dari berbagai kemungkinan hasil yang ada di daerah tersebut, seperti industri dan perdagangan, industri perjalanan dan usaha kecil dan menengah yang dapat dikemas dengan baik. Dengan hasil yang berbeda dari daerah yang ada dan bantuan SDM yang memuaskan, kemajuan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang signifikan dan siklus moneterinya.

C. Kehidupan Sosial Dan Politik Sidokarie Pada Periode Pemekaran 1859-1862

Pemekaran dan penyesuaian wilayah di Indonesia merupakan rangkaian tindakan dan perluasan majelis

administratif baru di tingkat keseluruhan serta pedoman kota dan induknya. Pertambahan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bukan karena angka kelahiran yang tinggi, melainkan karena kemajuan urbanisasi karena perkembangan wilayah dan perumahan di Sidoarjo saat ini serta menjadi padu bagi Kota Surabaya.

Banyaknya pemukim dari Surakarta, Tengah Jawa, daerah depan pantai Gresik dan Madura mulai sekitar tahun 1820, membuat Sidoarjo menjadi kota yang ramai dengan banyaknya penduduk. Dengan mayoritas pekerja rakyatnya adalah peternak. Sidoarjo menjadi daya tarik bagi penduduk metropolitan karena merupakan pusat agribisnis dan hewan peliharaan. Selain itu, Sidoarjo sebagai kota delta yang berkembang benar-benar berfungsi sebagai kota yang maju. Evaluasi lain menyatakan bahwa lokal harus dimanfaatkan sebagai pembuat barang-barang agraris, perikanan, dan barang-barang individu yang tak tertandingi.

Di Jawa sendiri, pada masa Hindia Belanda sekitar tahun 1830-an, sekitar tahun itu banyak organisasi gula yang terbagi atau di kirim ke bermacam macam daerah di Jawa Timur. Contohnya seperti di Kabupaten Sidoarjo yang dikenal dengan Kota Surabaya yang pada saat itu merupakan kota terdepan yang bisa menjadi pusat perdagangan selain Batavia. Beberapa laporan dari pejabat publik menyatakan bahwa pemanfaatan lahan untuk industri (khususnya bisnis) di Sidoarjo telah dimulai sejak pertengahan abad kesembilan belas, tepatnya pada tahun 1835. Sekitar waktu itu, penggunaan lahan adalah dalam bisnis gula. merupakan barang yang memiliki kepastian jual yang tinggi. Bahkan ada 12 pabrik pengolahan gula (PG) yang bekerja di Kabupaten Sidoarjo diantaranya PG Ketegan, PG Taman, PG Sruni, PG Gedangan, PG Buduran, PG Candi, PG Tulangan, PG Krembung, PG Wonoayu, PG Krian, PG Prambon dan PG Watoetoelis. Pemerintah peziarah Belanda juga memberikan transportasi berupa kereta api untuk menunjang kelancaran arus bisnis.²²

Aktivitas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo harus dilihat dari banyaknya SDM yang bermanfaat, yang menjadikan banyak penyokong keuangan untuk berkontribusi sebagai jenis spekulasi. Salah satunya adalah PG Watoetoelis yang pertama kali didirikan oleh sebuah perkumpulan yang ditegaskan oleh Belanda bernama NV Cooy dan Coster Van Hout pada tahun 1838 yang berlokasi di Surabaya. Pada mulanya PG Watoetoelis diawasi oleh Belanda, namun oleh dan oleh Belanda pada umumnya akan mengusahakan harta dan pekerjaan mereka. Buruh yang berkedudukan di bidang otoritatif lebih ditekankan pada kehormatan, dengan alasan bahwa menurut anggapan Belanda yang berdarah biru dijadikan otoritas manajerial, maka hasilnya akan lebih enak. Sementara kelas pekerja yang lebih rendah akan dimanfaatkan sebagai pekerjaan yang tidak kompeten dengan perbedaan mencolok dalam kompensasi kontras dengan otoritas otoritatif. Demikian juga dalam hal tanah, Belanda juga melakukan pengaturan yang tidak membantu individu, terutama peternak atau pemilik tanah yang tidak memiliki standar keadilan dalam berbagi hasil. Hal ini dibuat berdasarkan keprihatinan yang sah bagi pemilik modal dan kepentingan komponen

²² Jaluediko, Pramono. Sidoarjo: Pusat Industri Gula Paling Potensial di Masa Kolonial, diakses dari <https://www.kompasiana.com/amp/jaluediko/sidoarjo-pusatindustri->

[gula-paling-potensial-di-masa-kolonial](https://www.kompasiana.com/amp/jaluediko/sidoarjo-pusatindustri-gula-paling-potensial-di-masa-kolonial) 552df5756ea8340d038b45be, pada tanggal 12 Februari 2022

penyalahgunaan untuk mengurangi biaya produksi seefisien mungkin.

Belanda melakukan pemaksaan atau memanfaatkan pekerjaan dan pemilik tanah untuk menghasilkan peti-peti uang yang kritis serta untuk mengurus sendiri kewajiban-kewajiban Belanda. Hal ini dapat diartikan bahwa keadaan sosial individu Sidoarjo telah jatuh ke dalam tatanan politik pembangunan terkekang yang memberikan keuntungan luar biasa bagi perintis penyimpanan Negara. Sepanjang tahun 1800-an kelebihan tanah yang diciptakan oleh negara-negara bagian dikonsumsi setiap tahun sebagai penghargaan untuk penyimpanan Belanda.

Padahal, pembangunan terkendala terjadi di seluruh Indonesia, namun terkendala pembangunan atau *Cutuurstelsel* di Sidoarjo yang lahannya diketahui sangat matang karena terletak di Desa Brantas. Pada tingkat mendasar, *cultuurstelsel* di Sidoarjo sangat merepotkan peternak asli. Pemerintah Hindia Belanda tidak berdamai dengan para petani muda negeri itu, melainkan dengan intimidasi. Khususnya pekerja pemerintah, baik perwakilan Eropa maupun pekerja Hindia Belanda, yang diberkahi dengan mengelola bobot peternak asli.

Produk dari pendekatan politik lainnya adalah *Cultuurprocenten* karena mereka memungkinkan untuk meningkatkan penciptaan. Jadi secara teratur tidak 1/5 dari tempat di mana ada peternak asli diambil, tetapi 1/3, kadang-kadang 1/2, dalam beberapa kasus bahkan setiap bagian terakhirnya. Juga, tanah yang dipetik adalah tanah yang bagus. Pemerintah Belanda, yang pada saat itu benar-benar membutuhkan uang kembalian yang besar, tidak dapat menyelesaikan kecurangan yang terjadi. Semua hal dipertimbangkan, peternak muda negara itu dipaksa untuk mengambil lebih lama dari waktu mereka. Juga, peternak terkadang perlu bekerja beringgu-minggu atau bahkan lama di tempat yang jauh dari kota mereka tanpa mendapatkan proporsi makanan.

Di perkebunan tebu, peternak asli perlu menggali parit, memotong kayu, membuat balok dan ubin untuk jalur produksi gula. Tuntutan tanah yang dijamin batal di darat dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda, tidak dibatalkan. Sebenarnya jumlah tugas yang dikumpulkan pada tahun 1840 dari 6 juta brilian, kemudian pada tahun 1859 meningkat menjadi 11 juta brilian. Selain itu, individu masih direpotkan dengan pekerjaan fisik, seperti dukungan jalan, perancah, parit dan banyak lagi. Tidak hanya itu, mereka juga harus mengurus bisnis untuk pangreh praja serta bekerja untuk kota. Jadi tidak diharapkan penduduk setempat menjadi jengkel.

Satu lagi kondisi bersahabat yang ditemukan di Sidoarjo adalah semakin meningkatnya keresahan masyarakat dalam kaitan antara kerangka sosial dan adanya kelas-kelas keuangan. Sidoarjo yang merupakan daerah dengan sistem moneter agraris, karena sebagian besar penduduknya adalah peternak. Di Sidoarjo kaum buruh dipisahkan menjadi dua, yaitu kaum gogol atau para peternak yang menguasai ladang-ladang milik kaum buruh dan kaum buruh wisma yang berada di bawahnya. Praktis setiap individu Sidoarjo bernama peternak gogol. Sedangkan orang-orang yang diistimewakan adalah pemilik tanah yang luas. Hal ini berkaitan dengan Sidoarjo sebagai daerah yang dimanfaatkan sebagai posisi perlawanan karena Belanda memanfaatkan karakteristik ini untuk mengubah

tuntutan sosial di mata masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh sasarannya.

Kondisi sosial lainnya adalah bahwa sebagian besar peternak yang memiliki lahan luas, pemilik danau, visioner bisnis fasilitas industri dan pedagang adalah orang-orang kaya yang meningkatkan kekayaan dan posisi sosial mereka seperti melakukan perjalanan ke Mekah. Para peternak yang melakukan perjalanan kewalahan dengan pemilik lahan yang sangat besar, di Gedangan, salah satu kecamatan di Sidoarjo, ada 633 perjalanan haji, mengalahkan Surabaya.

Setelah kembali dari Mekah para haji mengalami pertemuan yang luar biasa, para haji ternyata lebih ketat dan memperluas latihan ketat yang membingkai hubungan yang nyaman dengan pesantren. Pesantren adalah sekolah ketat yang memainkan peran penting dalam membentuk otoritas negara yang ketat. Pelopornya disebut *kyai*, yang berasal dari seorang peternak besar kaya raya, saudagar, rentenir tunai dan selanjutnya memiliki hubungan dengan ahli keuangan tepi laut. Bagaimanapun, Sidoarjo adalah daerah yang ekonominya bermasalah mengingat buruh untuk pembangunan daerah-daerah penghasil gula di Jawa. Hal ini menyebabkan individu melakukan tindakan terhadap mereka karena mereka merasa dilecehkan. Ada juga individu yang memiliki hubungan yang tidak harmonis antara individu pribumi dan jaringan pekerja. Hal ini membuat mereka mencari individu yang dapat mengurangi masalah mereka. Pengejaran mereka membawa mereka lebih seperti otoritas yang lebih ketat.

Selanjutnya, keadaan sosial di Sidoarjo adalah perkembangan Masjid Jami Al Abror yang terletak di Jalan Kauman yang ditunjukkan dengan bentuk kedua sejarah Sidoarjo yang dikerjakan pada masa pemerintahan R. Notopuro (RTP Tjokronegoro) yang erat kaitannya dengan berdirinya lokal Sidoarjo. Masjid Jami Al Abror pada awalnya merupakan sebidang tanah yang sebelumnya sudah berdiri namun belum ada strukturnya dan dilanjutkan dengan pembangunan dengan membuat blok-blok menjadi bangunan dasar masjid. Pondasi Masjid Jami Al Abror menjadi titik pusat pergantian peristiwa dan penyebaran agama Islam di Kabupaten Sidoarjo.

PENUTUP

Latar belakang sejarah Sidoarjo pernah dikenal sebagai tempat tengah Kerajaan Janggala. Pada masa ekspansionisme Hindia Belanda, wilayah Sidoarjo bernama Sidokare, yang sangat vital bagi Kabupaten Surabaya. Kabupaten Sidokare dipimpin oleh seorang administrator yang ditunjuk bernama R.Ng. Djojohardjo. Pada tahun 1859 berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 *Staatsblad* No. 6 Wilayah Kabupaten Surabaya dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Sidokare dikendarai oleh R. Notopuro (kemudian bernama R.T.P Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Dia adalah anak dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare yang memiliki makna menghebohkan diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo.

Aktivitas masyarakat di Kabupaten Sidoarjo harus dilihat dari banyaknya SDM yang bermanfaat, yang menghasilkan banyak penyokong keuangan untuk disumbangkan sebagai suatu jenis usaha. Satu lagi kondisi bersahabat yang ditemukan di Sidoarjo adalah semakin

berkembangnya gejala publik dalam hubungan antara kerangka sosial dan adanya kelas moneter. Sebagian besar peternak yang mengklaim lahan yang sangat luas, pemilik danau, produsen dan makelar adalah orang-orang kaya yang meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan ekonomi mereka seperti melakukan perjalanan ke Mekah. Pembangunan Masjid Jami Al Abror yang terletak di Jalan Kauman yang ditunjukkan dengan bentuk kedua sejarah Sidoarjo dikerjakan pada masa pemerintahan R. Notopuro (R.T.P Tjokronegoro) yang erat kaitannya dengan berdirinya wilayah Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip & Publikasi Resmi:

- Arsip Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sidoarjo, 2002.
Sejarah dan Perkembangan Pabrik Gula Watoetoelis. (Administratur PG Watoetoelis, Sidoarjo, 2013)
Staatsblad van Nederlandsch Indie, Splittings van het Regentschap Soerabaija in Twee Regentschappen, 1859, no. 6a,
Sidarjokab.bps.go.id dalam Sidoarjo Dalam Angka 2011, 2012
Staatsblad van Nederlandsch Indie, Bepaling, dat het Regentschap Sidhokarie (Residentie Soerabaija) voortaan den Naam Zal Voe+ren van Sidho-Ardjo, 1859, no. 32, hlm. 8-9.

B. Artikel:

- Andrian, Deni. (2018). Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, Kerajaan Jenggolo di Sidoarjo.
candi pari. situs resmi yang menjelaskan tentang wisata dan kondisi Desa Candi Pari.
Jaluediko, Pramono. Sidoarjo: Pusat Industri Gula Paling Potensial di Masa Kolonial, diakses dari https://www.kompasiana.com/amp/jaluediko/sidoarjo-pusatindustri-gula-paling-potensial-di-masa-kolonial_552df5756ea8340d038b45be, pada tanggal 12 Februari 2022
Kabupaten Sidoarjo - Pemkab Sidoarjoportal.sidoarjokab.go.id
Lilis Melasanti, "Pengertian Cultuurprocenten" <https://lilimeliasanti.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 12 Februari 2022
Sidarta, Mawan. (2018). Selayang Pandang PG Watoetoelis di Sidoarjo
republikjatim.com. (2019). Berusia 341 Tahun, Masjid Al Abror Dikenal Sebagai Asal Muasal Penyebaran Islam di Kota Delta
Syafira, N. I. (2019). Dibalik Nama Sidoarjo.

C. Buku:

- Basundoro, P. (2013). *Merebut Ruang Kota Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960 an*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri
Dick, H.W. (2006). *Surabaya, City of Work, A Socioeconomic History, 1900-2000*. (atthens: Ohio University Press
Dick, H.W (eds.). (1997). *Balanced Development: East Java in the New Order, Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: Gramedia

Faber, G.H. von. (1931). *Oud Soerabaia. De Geschiedenis van Indies Eerste Koopstad van de Oudste Tijden tot de Insteling van den Gemeenteraad (1906)*. Soerabaia: N.V. Kon. Boekhandelen Drukkerijen G. Kolff & Co..

Handinoto. (1996). *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*. Yogyakarta: Andi Offset

Nasution. (2006). *Ekonomi Surabaya pada Masa Kolonial (1830-1930)*. Surabaya: Intelektual

Puesponegoro & Notosusanto. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia IV*. (Jakarta: Balai Pustaka.

Sartono, Kartodirdjo.(2015). *Pembemberontakan petani di banten 1888*. Depok Komunitas Bambu.

Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo. (2006). *Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname*. Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo.

Widodo, Dukut Imam. (2013). *Sidoardjo Tempo Doeloe*. Surabaya: Dukut Publishing

D. Jurnal:

- M. R. Fernando. (1995). *Journal of Southeast Asian Studies: The Trumpet Shall Sound for Rich Peasant:Kasan Mukmin's Uprising in Gedangan, East Java, 1904* terj. Zizi. Singapore: National University og Singapore
Rifai, R. (2009). *Spatial Modeling and Elements at Risk Assessment of Sidoarjo Mud Volcanic Flow*. Tesis. Yogyakarta: Graduate School Gadjah Mada University, 2006.
Susilo, Agus, Isbandiyah. Politik Etis dan Pengaruhnya bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *Jurnal, Historia (ISSN: 2337-4713)*.Vol. 6 No. 2, Hlm. 403-416